

**PERAN DIKLAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PERIKANAN BELAWAN**

TESIS

OLEH

**TIARA SINURAT
NPM. 181801027**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Diklat dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan

Nama : Tiara Sinurat

NPM : 181801027



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Kadir, M.Si

Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Abdul Kadir, M.Si

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

ABSTRAK

PERAN DIKLAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERIKANAN BELAWAN

Nama : Tiara Sinurat
NPM : 181801027
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Pembimbing II : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, jumlah kemiskinan di daerah pesisir mencapai 32,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional. Nelayan di Belawan masih banyak belum memahami teknologi perikanan tangkap ramah lingkungan laut sehingga banyak nelayan menggunakan bahan-bahan berbahaya. Rumusan masalah adalah bagaimana peran diklat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dan bagaimana faktor kendala dihadapi dalam pelaksanaan program diklat untuk pemberdayaan masyarakat nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan. Metode penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan diklat belum sepenuhnya berperan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menjaga kesinambungan usaha tangkap ikan laut. Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan program diklat adalah materi diklat masih kurang memuat semua hal-hal penting dibutuhkan nelayan, yaitu tidak memuat materi ancaman pidana perusakan lingkungan laut, tidak memuat materi teknologi pengawetan ikan, serta tidak memuat materi kewirausahaan. Direkomendasikan penyelenggaraan diklat perlu membuat materi berkaitan dengan ancaman hukum perusakan lingkungan laut, materi teknologi pengawetan ikan, materi kewirausahaan, serta mengupayakan agar tersedia fasilitas lebih baik dan layak.

Kata Kunci: Diklat, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan

ABSTRACT

ROLE OF TRAINING IN EMPOWERMENT OF FISHERMEN COMMUNITIES IN THE FARMING CENTER AND FISHERIES TRAINING BELAWAN

Name : Tiara Sinurat
NPM : 181801027
Study Program : Magister Administrasi Publik
Supervisor I : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Supervisor II : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Based on data from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in 2018, the number of poverty in coastal areas reached 32.14% of the total number of poor people nationwide. Many fishermen in Belawan still do not understand marine environmentally friendly capture fisheries technology so that many fishermen use hazardous materials. The formulation of the problem is how the role of education and training in the empowerment of fishing communities and how constraints are faced in the implementation of the training program for empowering fishermen communities at the Belawan Fisheries Education and Training Center. The research method used is descriptive qualitative method. The results showed that education and training had not fully played a role in empowering fishing communities where there was still a lack of awareness of fishermen communities to maintain the sustainability of marine fish fishing businesses. Obstacle factors in the implementation of the education and training program are that the education and training materials do not contain all the important things fishermen need, namely not containing material on the threat of criminal damage to the marine environment, not containing material on fish preservation technology, and not including entrepreneurship material. It is recommended that the implementation of education and training needs to make materials related to legal threats to the destruction of the marine environment, materials on fish preservation technology, entrepreneurship materials, and striving for better and proper facilities.

Keywords: Training, Empowerment, Fishermen Community

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori.....	9
2.1.1. Pengertian Peran.....	9
2.1.2. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan).....	10
2.1.3. Perikanan	23
2.1.4. Pemberdayaan Masyarakat.....	27
2.2. Penelitian Terdahulu	45
2.3. Kerangka Pemikiran.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	48
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.3. Informan Penelitian	49
3.4. Teknik Pengumpulan Data	49
3.5. Teknik Analisis Data	50
3.6. Definisi Operasional.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1. Sejarah Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan	54
4.1.2. Visi dan Misi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan	56
4.1.3. Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan	57
4.1.4. Uraian Tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan	58
4.1.5. Kinerja Kegiatan Diklat.....	62
4.2. Pembahasan	67
4.2.1. Peran Diklat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan	67
4.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Diklat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan	108

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan.....	114
5.2. Rekomendasi	115

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah dikaruniai sumber daya kelautan dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Indonesia memiliki 17.499 buah pulau dengan panjang garis pantai membentang 80.791 km dan luas lautnya mencapai 3,25 juta km². Potensi tangkap perairan laut Indonesia diperkirakan 7,3 juta ton/tahun yang secara ekonomi ditaksir 1,2 triliun dolar AS, atau setara 10 kali lipat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2012. Karenanya, keberadaan potensi kelautan yang besar tersebut semestinya dapat dijadikan pertimbangan beralihnya paradigma pembangunan nasional dari daratan (*land based orientation*) ke maritim (*ocean based orientation*).

Sehubungan dengan itu, presiden Jokowi telah menyatakan komitmennya untuk memajukan sektor kelautan dengan menyatakan bahwa masa depan Indonesia ada di laut, sehingga potensi kelautan harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebesar 70 persen atau dua per tiga luas wilayah Indonesia adalah lautan sehingga potensinya sangat besar untuk menjadi penggerak perekonomian nasional, tetapi hingga saat ini potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan ekonomi kelautan negara Thailand yang bisa menyumbang PDB hingga US\$ 212 miliar, padahal panjang garis pantainya hanya 2.800 kilometer atau hanya 2,8

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

persen dari garis pantai Indonesia yang mencapai 99.000 kilometer. Sementara Indonesia dengan garis pantai yang amat panjang tersebut dan wilayah laut yang lebih luas dari daratannya hanya berkontribusi 30 % terhadap PDB nasional. Padahal, berdasarkan informasi yang diperolehnya, potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia sebenarnya jauh melebihi Thailand dengan nilai bisa mencapai US\$ 1,2 triliun, dan diperkirakan juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40 juta orang (<https://katadata.co.id/berita/2016/06/16/jokowi-masa-depan-indonesia-ada-di-laut>, diakses pada tanggal 20 November 2019).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi kelautan khususnya dalam bidang perikanan tergolong sangat besar, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tetapi hingga saat ini sebagian besar nelayan masih tergolong berada di dalam kemiskinan, berbanding terbalik dengan potensi kekayaan laut yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Masyarakat nelayan sebagai kelompok yang secara langsung memanfaatkan dan mengusahakan sumberdaya perikanan melalui kegiatan tangkap dan budidaya telah lama terjerat dalam kemiskinan yang mendalam. Oleh karena itu pemerintah perlu memberdayakan masyarakat nelayan sehingga lebih mampu dan lebih mandiri dalam mengelola sumber daya laut.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, jumlah kemiskinan di daerah pesisir mencapai 32,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional, sementara jumlah penduduk miskin nasional menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018 mencapai 28,59 juta orang, maka dapat kita ketahui bahwa data kemiskinan di daerah pesisir pada tahun 2018 mencapai 7,18 juta

Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan masyarakat nelayan yang tidak berdaya dapat memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengangkat nelayan dari kemiskinan agar menjadi lebih berdaya dan mampu secara mandiri di segala bidang kehidupan, yaitu dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh nelayan itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Inti dari pemberdayaan masyarakat nelayan adalah bagaimana nelayan dapat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga mengurangi ketergantungan masyarakat ke pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah harus mengambil peranan mendorong usaha masyarakat nelayan untuk mengelola kelautan, terutama dengan memberikan bimbingan teknis operasional usaha. Dengan adanya bimbingan teknis mengenai keahlian penangkapan ikan yang disertai dengan pelestarian sumber daya laut maka masyarakat nelayan akan lebih mudah belajar hingga menjadi mapan dalam mengelola perikanan secara berkeinambungan. Pemberian bimbingan tentang keahlian atau keterampilan perikanan dapat dilakukan melalui pendidikan dengan pelatihan (diklat), dimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

pemerintah berperan memfasilitasi berbagai kebutuhan agar diklat tersebut dapat benar-benar terlaksana dengan baik.

Diklat masyarakat nelayan adalah suatu program dengan metode terpadu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kompetensi nelayan dengan memadukan pendidikan dan latihan secara efisien dan efektif dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan diklat nelayan adalah untuk membuka wawasan para nelayan dari sekadar mencari ikan di laut menjadi lebih produktif dalam mengelola usaha perikanan tangkap sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan nelayan. Bidang-bidang diklat yang dapat diselenggarakan adalah bidang keselamatan pelayaran, bidang teknologi perikanan, bidang sumber daya manusia, dan bidang sumber daya alam. Teknologi mencakup alat dan armada untuk menangkap ikan, sumber daya manusia terdiri dari keterampilan nelayan mulai dari perencanaan hingga mengawetkan ikan, dan yang terpenting adalah menjaga kelestarian sumber daya alam dengan perikanan ramah lingkungan agar hasil laut dapat dinikmati secara berkelanjutan. Diklat tentang usaha perikanan yang ramah lingkungan diperlukan agar nelayan tidak menggunakan cara dan alat yang dapat merusak ekosistem laut, seperti bahan peledak, beracun, dan alat tangkap trawl (pukat harimau). Alat-alat tersebut dapat meningkatkan hasil tangkapan, namun berdampak negatif untuk jangka panjang, yaitu merusak karang, ikan-ikan kecil dan biota laut lainnya, sehingga berpotensi mengancam kelanjutan usaha perikanan dalam jangka panjang.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kelautan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Pusat Pelatihan Kelautan dan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Perikanan, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Adapun tugas BPPP Belawan adalah melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang usaha perikanan. Jumlah peserta diklat baik pelatihan masyarakat maupun pelatihan aparatur di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan dari tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Peserta Diklat Untuk Pelatihan Masyarakat dan Pelatihan Aparatur di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan Tahun 2017 – 2019

Tahun	Pelatihan Masyarakat (orang)	Pelatihan Aparatur (orang)	Sub Total (orang)
2017	3.570	360	3.930
2018	1.080	-	1.080
2019	2.010	120	2.130

Sumber: Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan, 2020

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Belawan sampai dengan kondisi saat ini telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang pengembangan SDM kelautan dan perikanan dengan jumlah peserta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 peserta diklat sebanyak 2.010 orang pelatihan masyarakat dan 120 orang pelatihan aparatur, sedangkan pada tahun 2017 peserta diklat mencapai 3.570 orang pelatihan masyarakat dan 360 pelatihan aparatur. Masyarakat nelayan pada saat ini sangat membutuhkan penanganan yang serius. Dua keterbelakangan utama masyarakat yaitu lemahnya pengetahuan dan keterampilan serta lemahnya ekonomi dominan terjadi pada masyarakat nelayan. Keduanya merupakan mata rantai yang harus

dibenahi secara bersamaan, dan menggunakan berbagai pendekatan, sehingga dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam perairan yang melimpah dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk pengelolaan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi meningkat. Dengan demikian dibutuhkan peran diklat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.

Tetapi dari pengamatan penulis bahwa nelayan di daerah Belawan masih banyak yang belum memahami teknologi perikanan tangkap yang ramah terhadap lingkungan laut sehingga banyak nelayan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam penangkapan ikan. Masyarakat nelayan di daerah Belawan masih melakukan praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia. Hal ini disebabkan materi pelatihan tidak meningkatkan pemahaman peserta mengenai ancaman terhadap kejahatan lingkungan sehingga kurang mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan. Nelayan perlu memahami bahwa kawasan perairan laut merupakan bagian yang dilindungi oleh undang-undang dengan ancaman pidana yang cukup berat. Hal tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan mengenai pentingnya menghindari penggunaan alat-alat tangkap yang dapat merusak ekosistem di perairan laut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: Peran Diklat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

1. Bagaimana peran diklat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan ?
2. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program diklat untuk pemberdayaan masyarakat nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun menganalisis secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

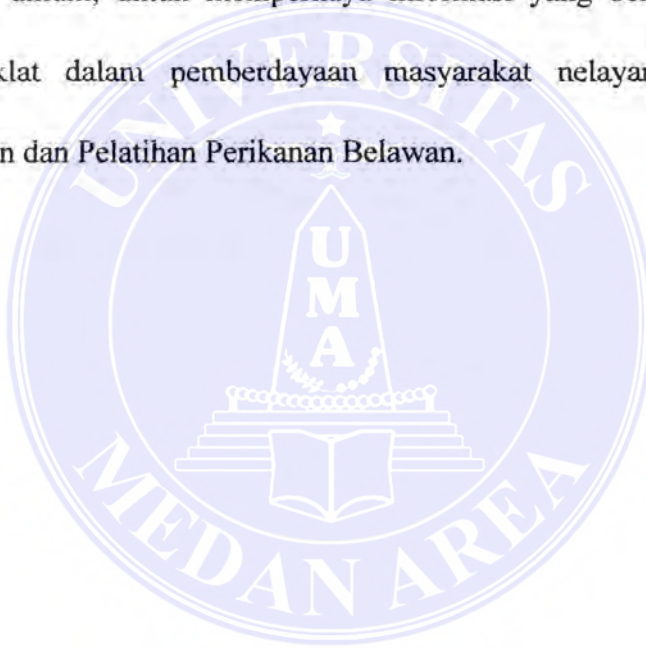
1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran diklat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program diklat untuk pemberdayaan masyarakat nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Para birokrasi, dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan strategi meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan.
2. Para akademisi, sebagai referensi tambahan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan peran diklat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan.

3. Bagi penulis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan untuk penerapan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku kuliah maupun dari buku-buku referensi yang ada;
 - b. Penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Medan Area.
4. Khalayak umum, untuk memperkaya informasi yang berkaitan dengan peran diklat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Peran

Menurut Depdikbud (2015:751) bahwa peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarwono (2016:224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku,
4. Kaitan orang dengan perilaku.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peranan lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Definisi peranan menurut Soekanto (2014: 212), peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Dari definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan

kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peranan berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan peranannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial.

2.1.2. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

2.1.2.1. Pengertian Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan Petambak Garam, pada Pasal 1 tertera bahwa Pemberdayaan Nelayan,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. Pada Pasal 13 juga disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan.

Pendidikan menurut Flipppo (Hasibuan, 2016:68) adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Sementara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Notoadmodjo (2014:16) bahwa pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Disamping itu pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.

Ahmadi (2015:141) menyatakan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah usaha yang sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan langsung seumur hidup. Nadler dan Lawler (2016:20) mendefinisikan pendidikan adalah proses pembelajaran yang mempersiapkan individu untuk pekerjaan yang berbeda pada masa yang akan datang.

Mulyasa (2015:139) menyatakan bahwa pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan memiliki wawasan yang lebih luas, terutama penghayatan akan arti penting produktivitas. Tujuan pendidikan nasional yang termaktub di dalam GBHN yakni: membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengembangkan kreativitas dan tanggungjawab, menyuburkan sikap demokrasi,

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

mengembangkan kecerdasan yang tinggi, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2014:42).

Pendidikan menurut Sedarmayanti (2016:379) adalah suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama.

Dari pengertian-pengertian mengenai pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha proses mengubah perilaku seseorang untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan individu untuk pekerjaan yang berbeda pada masa yang akan datang melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Unsur-unsur pendidikan menurut Notoadmodjo (2014:16) terdiri dari:

1. Input

Sasaran pendidikan, yaitu: individu, kelompok, masyarakat.

2. Pendidik

Yaitu pelaku pendidikan.

3. Proses

Yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain.

4. Output

Yaitu melakukan apa yang diharapkan / perilaku.

2.1.2.2. Manfaat Pendidikan

Dalam ekonomi hal ini disebut “manfaat pribadi”. Para ekonom membedakan manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Manfaat sosial adalah sesuatu yang dapat mengembangkan orang selain pendidikan. Masyarakat dikatakan lebih baik karena pendidikan mereka.

Karakteristik dan pembawaan umum tertentu dapat dianggap sebagai hasil dari sekolah, termasuk pemahaman tentang nilai demokrasi sebagai upaya untuk memerangi segala bentuk kediktatoran dalam suatu pemerintahan dan kemampuan untuk berpikir kritis dan yang pantas. Keahlian tersebut mungkin menjadi pengaruh tidak langsung dari bidang studi kewarganegaraan, ilmu sosial, sejarah, filsafat, bahasa, dan pengajaran lain.

Perubahan yang dipengaruhi oleh pengalaman pendidikan. Secara metodologis hal ini berarti bahwa pengukuran pretest dan posttest pada individu diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan yang disebabkan oleh pendidikan. Hal ini dikenal sebagai pendekatan penambahan nilai.

Terdapat lima cara yang berbeda untuk membuat fakulasi (penghitungan) dan mengaplikasikan metode yang spesifik pada pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama adalah dalam mengevaluasi perubahan individu, segala yang dihabiskan dalam pendidikan (tingkat biaya) adalah ukuran kelebihanannya. Kedua yaitu menyelidiki reaksi klien terhadap pendidikan universitas. Ketiga adalah mempertimbangkan peningkatan dalam nilai kapita dari manusia yang merupakan hasil dari pendidikan yang lebih tinggi. Keempat melihat seberapa besar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pendidikan yang lebih tinggi bertanggung jawab atau berperan dalam pertumbuhan. Kelima dalam memperkirakan nilai pendidikan universitas dengan melihat pada tingkat pengembalian investasi pada pendidikan universitas.

Manfaat pendidikan diperoleh selama pengalaman dari pendidikan itu sendiri, manfaat pendidikan dapat ditanyakan pada pegawai setelah mereka melaksanakan pendidikan. Persamaannya seperti manfaat sosial dari mengikuti diklat selama pengalaman pendidikan.

Penting sekali untuk mengetahui apa manfaat yang meluas dari pendidikan agar dalam mengalokasi sumber tidak hanya antara berbagai macam dan tingkat sekolah tetapi juga antara pendidikan dan juga program sosial. Manfaat pendidikan juga harus dihargai untuk memutuskan bagaimana membiayai pendidikan pada tingkat yang berbeda. Jika manfaat meluas pada masyarakat yang bersekolah, terdapat alasan untuk memajukan pembiayaan sendiri bagi proses pendidikan, bahkan bias dari pinjaman. Manfaat pendidikan juga harus diidentifikasi untuk menginterpretasikan motivasi pendidik. Secara mendasar pengetahuan diperlukan sebagai manfaat pendidikan sehingga proses pendidikan dapat dievaluasi melalui analisis harga manfaat yang berhubungan dengan alokasi dana dan dalam penetapan manajemen.

Indikator pendidikan menurut Notoadmodjo (2014:18) terdiri dari:

a. Pemilihan program

Pemilihan program ditujukan agar pendidikan yang diberikan kepada

karyawan menjadi terarah sesuai dengan bidang yang telah diserahkan kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

b. Program pendidikan memperbaiki sikap

Dengan adanya program pendidikan dapat memperbaiki sikap karyawan di dalam perusahaan baik terutama pada saat menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

c. Program pendidikan secara berkesinambungan

Program pendidikan dibutuhkan perusahaan dan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kemajuan teknologi.

d. Program pendidikan sesuai rencana

Program pendidikan yang telah dipilih harus dilakukan sesuai rencana agar ilmu yang akan diperoleh karyawan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan.

2.1.2.3. Pengertian Pelatihan

Istilah *training* yang diidentikkan dengan kegiatan latihan adalah suatu proses belajar yang lebih mengutamakan aspek pelatihan dan pengalaman bekerja di lapangan. Melalui proses ini diharapkan dapat mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja mendasar seseorang, sehingga dapat memperbaiki kemampuannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan lebih baik dan produktif, dengan kata lain seseorang berprestasi dalam pekerjaannya.

Menurut Dessler (2014:280) bahwa pelatihan mengacu kepada metode yang digunakan untuk memberikan pegawai baru atau yang ada saat ini dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan. Oleh karena itu,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

latihan bagi pegawai merupakan proses yang harus terus-menerus berlangsung

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan usaha-usaha memperbaiki produktivitas kerja pegawai serta produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan.

Menurut Hasibuan (2016:180), pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai sesuai kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Pelatihan tidak dapat dipandang sebagai pengorbanan perusahaan yang sia-sia karena pada dasarnya pelatihan tersebut adalah investasi yang sangat penting bagi perusahaan.

Banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari kegiatan latihan bagi organisasi perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan proses penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktivitas kerja. Manfaat dari pelaksanaan latihan ini menurut Handoko (2015:114) adalah:

a. Peningkatan produktivitas

Kegiatan latihan dan pengembangan tidak saja bermanfaat bagi pegawai baru, melainkan juga terhadap pegawai yang sudah lama bekerja. Hal ini dapat meningkatkan prestasi kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan bagi organisasi perusahaan.

b. Peningkatan kualitas

Program latihan dan pengembangan yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan membantu pegawai untuk memperbaiki hasil yang lebih tinggi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
kualitasnya. Pegawai yang dilatih akan lebih baik cara kerjanya dan juga terhadap

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

manajer yang dikembangkan kemampuannya akan dapat meningkatkan manfaat organisasi perusahaan.

c. Mempermudah perencanaan SDM

Program latihan dan pengembangan yang baik dapat membantu organisasi perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan mengalami perubahan yang drastis jika mengalami penggantian pegawai secara mendadak. Jika terjadi kekosongan, maka perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pegawai dari dalam organisasi karena terdapat program latihan dan pengembangan yang cukup bagi pegawai yang *non manajer* atau tingkat *manajer*.

d. Memperbaiki etika kerja

Iklim kerja suatu perusahaan biasanya akan mudah diperbaiki apabila program latihan dan pengembangan pegawai dijalankan di perusahaan. Reaksi-reaksi yang positif akan tumbuh dari program latihan dan pengembangan yang direncanakan dengan baik, dan pada gilirannya akan membentuk sikap dan etika kerja yang lebih baik. Pembiasaan cara-cara kerja yang baik akan sangat membantu dalam memperbaiki etika kerja. Peningkatan etika kerja disebabkan oleh beberapa faktor, akan tetapi satu hal yang paling penting adalah terdapat program latihan dan pengembangan.

e. Kompensasi tidak langsung

Latihan dan pengembangan bagi para pegawai terutama di tingkat manajer merupakan bagian dari balas jasa terhadap pekerjaannya. Mereka mengharapkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

perusahaan membayar biaya program latihan dan pengembangan yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan mereka.

f. Kesehatan dan keselamatan

Pelaksanaan program latihan dan pengembangan sering dihubungkan dengan kesehatan dan keselamatan fisik pegawai. Latihan yang tepat akan mencegah kecelakaan dan penciptaan lingkungan kerja yang segar dapat mengarahkan mental pegawai yang stabil.

2.1.2.4. Metode Pelatihan

Program latihan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, obsesi dan serta memperbaiki kepuasan kerja. Menurut Handoko (2015:110), ada dua kategori pokok program latihan, yaitu:

- a. Metode praktis (*on the – job training*)
- b. Teknik-teknik presentase informasi dan metode-metode simulasi (*off the job training*).

Handoko (2015:112): mengatakan teknik-teknik *on the job* merupakan metode latihan dan pengembangan yang paling banyak digunakan. Pegawai dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung dari seorang pelatih yang berpengalaman (biasanya pegawai lain).

Berbagai teknik yang biasa digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut:

a. Rotasi jabatan

Memberikan kepada pegawai tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan manajerial.

b. Latihan instruksi pekerjaan

Petunjuk-petunjuk pengerjaan diberikan secara langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para pegawai tentang cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang.

c. Magang (*apprenticeship*)

Merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan istilah *off the job*.

d. Pembinaan (*Coaching*)

Penyelia atau atasan akan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pegawai dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Penyelia dan pegawai sebagai bawahan sama dengan hubungan *tutor* dengan mahasiswa.

e. Penugasan sementara

Penempatan pegawai pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Pegawai terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah organisasional nyata.

Tiga dari langkah analisis kebutuhan pelatihan antara lain, yaitu :

- a. Mengidentifikasi keterampilan kinerja jabatan khusus yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja dan produktivitas.

- b. Menganalisis peserta untuk memastikan bahwa program akan sesuai dengan tingkat pendidikan khusus mereka, pengalaman, dan keterampilan juga sikap dan motivasi pribadi mereka.
- c. Menggunakan penelitian untuk mengembangkan sasaran pengetahuan dan kinerja yang dapat diukur.

2.1.2.5. Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Menurut Sastrohadiwiryo (2016:200-201), pendidikan dan pelatihan dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Pendidikan Umum

Yaitu pendidikan yang dilaksanakan didalam dan diluar sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dengan tujuan mempersiapkan dan mengusahakan para peserta pendidikan memperoleh pengetahuan umum.

b. Pendidikan Kejuruan

Yaitu pendidikan umum yang direncanakan untuk mempersiapkan para beserta pendidikan maupun melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang kejuruannya.

c. Pelatihan Keahlian

Yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan termasuk didalamnya pelatihan ketatalaksanaan.

d. Pelatihan Kejuruan

Yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada umumnya bertaraf lebih rendah dari pada pelatihan keahlian.

Dalam pemilihan teknik tertentu untuk digunakan dalam program latihan ada beberapa *trade off*, ini berarti tidak ada suatu teknik yang selalu paling tepat, dan metode atau teknik terbaik tergantung pada seberapa besar suatu teknik memenuhi faktor-faktor berikut yang menjadi indikator dari diklat menurut teori Flippo dalam Hasibuan (2016:181):

a. Materi diklat

Materi pelatihan merupakan bahan ajaran yang menjadi pokok pelatihan, dan bahan ajaran tersebut telah disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami. Materi pelatihan harus berhubungan dengan kepentingan peserta pelatihan agar lebih bermanfaat dalam menunjang penyelesaian pekerjaan yang ditanganinya.

b. Instruktur atau pelatih

Instruktur atau pelatih merupakan orang yang sudah cukup menguasai materi pelatihan yang akan dibahas dalam pelatihan. Instruktur tersebut dapat berasal dari pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan cukup baik dan dapat pula berasal dari lembaga pelatihan atau orang yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan pelatihan. Tetapi, sebaiknya instruktur akan lebih baik apabila berasal dari kalangan tertentu yang secara

husus dididik untuk melakukan pelatihan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

c. Fasilitas diklat

Fasilitas yang digunakan dalam pelatihan mencakup semua alat peraga atau peralatan lain yang dapat digunakan untuk membantu memudahkan pelaksanaan pelatihan. Perlengkapan alat-alat peraga tersebut sangat penting mengingat tidak semua hal dapat dijelaskan secara mudah hanya dengan menggunakan bahasa.

Instruktur dan peserta pelatihan sering lebih terbantu memahami materi pelatihan dengan berbagai perlengkapan alat peraga, sehingga keberadaan perlengkapan yang berhubungan dengan materi pelatihan menjadi sangat penting.

Tujuan utama dari diadakannya pendidikan dan pelatihan ialah sebagai sarana perumusan kemampuan diharapkan seperti yang diungkap oleh Simamora (2015:220-221):

- a. Memperbaiki kinerja
- b. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pegawai
- c. Membantu menyelesaikan masalah operasional
- d. Mempersiapkan karyawan untuk promosi
- e. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi.

2.1.3. Perikanan

Perikanan adalah semua usaha penangkapan budidaya ikan dan kegiatan pengelolaan hingga pemasaran hasilnya. Sedangkan sumber daya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat

maupun laut), oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut (Mubiyarto, 2014:14).

Perikanan darat adalah semua usaha perikanan yang tidak dilakukan di laut luas seperti perikanan air tawar, tambak, kolam dan sebagainya. Khusus perikanan di laut ahli biologi kelautan membedakan perikanan laut dalam dua kelompok yaitu kelompok ikan pelagis (ikan yang hidup pada bagian permukaan) dan jenis ikan demersal (ikan yang hidup di dasar laut). Kelompok ikan pelagis di antaranya ikan cakalang, tuna, layang, kembung, lamun dan lain-lain. Sedangkan jenis ikan demersal seperti udang, kepiting, kakap merah dan lain-lain.

Wangladi (2015:3) mengungkapkan bahwa usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi yang dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal atau apapun yang dianggap sejenisnya. Definisi ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang laku dijual dan tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang langsung dengan menangkap ikan.

Menurut Hanafiah dan Saefuddin (2017:33), usaha penangkapan ikan merupakan menangkap atau mengumpulkan binatang atau tumbuhan yang hidup di laut untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan pengorbanan tertentu.

Sumberdaya perikanan adalah seluruh binatang dan tumbuhan yang hidup di perairan (baik di darat maupun di laut) oleh karena itu perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Zubair dan Yasin (2011:4) mengemukakan bahwa usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi atau suatu barang antara yang dihasilkan faktor-faktor produksi klasik tenaga kerja dan barang-barang modal atau apapun yang dianggap sejenisnya. Definisi ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperoleh hasil yang laku dijual dan tidak terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang langsung dengan menangkap ikan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan merupakan segala pengorbanan yang ditujukan untuk memperoleh hasil laut dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan nelayan ataupun nelayan ikan. Nelayan adalah orang-orang yang aktif dalam melakukan kegiatan pada sub sektor perikanan dan ini dilakukan dalam usaha ekonomi, oleh karena itu indikator yang digunakan untuk menentukan bahwa seseorang termasuk nelayan apabila seluruh atau sebagian besar penghasilan pendapatan rumah tangganya merupakan kontribusi dari pendapatan yang diperoleh dari sub sektor perikanan. Selain itu pengetahuan dan keterampilan sangat menentukan produktivitas nelayan seperti yang dikemukakan oleh Zubair dan Yasin (2011:5) bahwa kekurangan pengetahuan merupakan faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas dan yang lebih penting adalah faktor ini yang menjadi penyebab tingkat produktivitas sejak berabad-abad yang lalu tidak mencapai perubahan yang berarti.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Indonesia, Nomor 65/Permen-KP/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, diketahui bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2018 difokuskan pada:

1. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan moda pengawasan yang terintegrasi;
 - b. penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran;
 - c. penenggelaman kapal ikan asing ilegal;
 - d. penguatan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing);
 - e. penguatan kerja sama regional maupun internasional; dan
 - f. penerapan Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS) secara konsisten.
2. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya);

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

- b. penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengawasan lainnya;
 - c. pengawasan kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatkan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - e. mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan.

2.1.4. Pemberdayaan Masyarakat

2.1.4.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan

Kecil, pada Pasal 1 menyatakan bahwa pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan, karena istilah tersebut mengacu kepada ketidakmampuan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Pengentasan kemiskinan membutuhkan program pemerintah yang mampu memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang terdapat pada daerah masing-masing.

Kemiskinan pada nelayan tidak berdiri sendiri. Kemiskinan nelayan adalah kemiskinan kultural dan juga kemiskinan struktural. Mereka miskin karena mereka memang miskin secara budaya (sumberdaya, mindset, mental dan semua aspek internal mereka) dan mereka miskin karena faktor eksternal (kebijakan, intervensi pasar dan semua aspek di luar kendali nelayan).

1. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dengan kemiskinan seperti sepasang sebab dan akibat. Yang satu bisa menjadi sebab bagi yang lain. Demikianlah yang dialami masyarakat nelayan. Mereka terbelakang pendidikan sehingga sulit meretas kemiskinannya, dan karena mereka

UNIVERSITAS MEDAN AREA sulit beranjak dari keterbelakangan pendidikan.

Lemahnya pendidikan menjadi sumber utama kebuntuan jalan bagi nelayan. Dari sisi ekonomi mereka tidak mampu mengatur pengelolaan keuangan dengan baik. Dari sisi keterampilan mereka terbatas pada penggunaan teknologi alat tangkap atau budidaya yang sederhana, sehingga akses mereka hanya pada jarak yang dekat yang tentu signifikan dengan hasil yang juga tidak terlalu banyak. Pada sisi lain, keterbelakangan penguasaan teknologi penangkapan menggiring mereka untuk menggunakan alat-alat atau cara yang sesungguhnya merusak sumberdaya yang mereka kelola, misalnya Pemberdayaan, Upaya Meretas Kemiskinan Masyarakat Nelayan dengan pengeboman, potassium, sianida ataupun tuba, juga metode penangkapan dengan berburu (merusak karang).

2. Kepemilikan Sumber Pendapatan yang Bersifat *Common Property*

Laut sebagai tempat mencari ikan bagi nelayan merupakan tempat pencarian yang bersifat milik umum (*common property*) yang dibarengi dengan rezim pengelolaan yang bersifat akses terbuka (*open access*). Kondisi ini membuat nelayan tradisional umumnya tidak mampu bersaing mendapatkan hasil yang sama dengan nelayan lain yang memiliki armada tangkap yang lebih besar.

Di laut nelayan bersaing dengan nelayan yang lebih kuat daya tangkapnya, di darat nelayan harus berurusan dengan retribusi yang kadang kurang berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil. Sehingga tidak heran jika nelayan kadang tidak mau mendaratkan kapalnya pada PPI yang sudah

pendapatannya. Pada kondisi yang lebih buruk, di sebagian wilayah pesisir telah terjadi *destructiv fishing* dan *over fishing* sehingga hasil yang diperoleh nelayan kecil semakin sedikit. Untuk memperoleh hasil yang lebih banyak mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh yang berefek pada BBM dan biaya yang lebih besar. Maka semua hal-hal ini kemudian menjadi seperti lingkaran setan bagi nelayan yang semakin menyulitkan mereka keluar dari keterpurukan ekonominya.

Menurut Suharto (2015:59), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya.

Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Anwas, 2014:48). Terkait definisi pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2015:169) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (12), pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.

Kartasmita (2014:45) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep

ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

centered, participatory, empowering and sustainable". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa lalu.

Selain kutipan diatas, terdapat definisi pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2015 :32) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu Vindyandika (2017:36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.1.4.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Segala upaya atau program yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat harus dirumuskan dengan jelas, meliputi tujuan dan manfaat serta rumusan mengenai program itu sendiri. Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi. Kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan *kognitif*, *konatif*, *psikomotorik*, dan *afektif* serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2014:45) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan *kognitif*, *konatif*, *psikomotorik* dan *afektif* serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi *konatif* merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

Kondisi *afektif* adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan *psikomotorik* merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

2.1.4.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Setiap program tidak lepas dari proses, karena proses adalah bagian paling penting, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan. Demikian juga dengan program pemberdayaan bahwa menurut Suharto (2015:59), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut

relasi sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi

ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Kartasasmita (2014:23) mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Proses menjadikan pemberdayaan masyarakat warga masyarakat berdaya diharapkan berkekuatan dapat dan menjadi lebih berkemampuan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

2.1.4.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik (Adi, 2016:179). Tetapi siklus tersebut akan dilepaskan setelah tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai.

Sumodiningrat (2015:41) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri.

Bentuk program pemerintah, antara lain berupa hasil-hasil inovasi atau teknologi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Begitu pula inovasi yang dihasilkan dunia usaha bertujuan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, hasil inovasi-inovasi belum sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan budaya masyarakat. Realitas keberagaman masyarakat yang sangat variatif, sulit rasanya bahwa suatu inovasi bisa diterima atau sesuai dengan semua masyarakat yang beragam tersebut. Dengan kata lain program *top down* tersebut, perlu diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal (*bottom up*).

Menurut Sulistiyani (2014:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Sulistiyani (2014:85), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyadaran

Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*).

2. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity bulding*, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.

3. Pendayaan

Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*). Suatu masyarakat dikatakan berdaya apabila mereka dapat tampil sebagai pelaku utama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Masyarakat yang bergantung kepada pihak lain dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya adalah masyarakat yang tidak berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan harus diartikan sebagai pelaku utama bagi pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

2.1.4.6. Masyarakat Nelayan

Penangkapan ikan dan pengumpulan hasil laut lainnya merupakan mata pencaharian pokok usaha nelayan. Pada dasarnya usaha penangkapan ikan yang dilakukan usaha nelayan secara teknis ekonomis merupakan suatu proses produksi yang bersifat ekstraktif, yakni mengambil hasil alam tanpa mengembalikan sebagian hasilnya untuk keperluan dikemudian hari (Mubyarto, 2014:36). Namun demikian tidak mesti berarti bahwa usaha perikanan rakyat merupakan usaha yang bersifat subsistem. Sebuah usaha nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada akhirnya akan bertujuan untuk memperoleh pendapatan usaha sebanyak-banyaknya.

Usaha nelayan yang sampai saat ini masih merupakan tema yang sangat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menarik untuk didiskusikan. Membicarakan usaha nelayan hampir semua isu

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang selalu muncul adalah masyarakat yang marginal, miskin dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun secara politik.

Menurut Sastrawidjaya (2014:20), nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

- a) Pertama, dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut atau pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka.
- b) Kedua, dari cara segi hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga kerja yang banyak.
- c) Ketiga, dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional.

Dari bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogeny. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara transportasi darat, sedangkan komunitas yang homogeny terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

produktivitasnya kecil. Sementara itu kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu usaha nelayan modern dan usaha nelayan tradisional. Usaha nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan Usaha nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.

Menurut Mubyarto (2014:38), pada umumnya dalam pengusahaan perikanan laut terdapat tiga jenis nelayan, yaitu: nelayan pengusaha, nelayan campuran dan nelayan penuh. Nelayan pengusaha yaitu pemilik modal yang memusatkan penanaman modalnya dalam operasi penangkapan ikan. Nelayan campuran yaitu seseorang nelayan yang juga melakukan pekerjaan yang lain di samping pekerjaan pokoknya sebagai nelayan. Sedangkan nelayan penuh ialah golongan nelayan yang hidup sebagai penangkap ikan di laut dan dengan memakai peralatan lama atau tradisional. Namun demikian apabila sebagian besar pendapatan seseorang berasal dari perikanan (darat dan laut) ia disebut sebagai nelayan.

Status usaha nelayan dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan modal dan keterampilan melaut. Usaha nelayan yang memiliki modal kuat ditempatkan pada nelayan atas yang disebut punggawa. Lapisan berikutnya ditempati oleh nelayan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang memiliki keterampilan tinggi dalam melaut disebut juragan. Sedangkan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

lapisan paling bawah adalah nelayan yang mempunyai keterampilan rendah dan hanya mengandalkan tenaga dalam penangkapan ikan disebut sawi (Salman, 2015:15).

Sejalan dengan itu, dalam hal tingkat pendidikan khususnya bagi nelayan tradisional, untuk bekal kerja mencari ikan dilaut, latar belakang seorang nelayan memang tidak penting artinya karena pekerjaan sebagai merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, maka setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah memberikan pengaruh terhadap kecakapan mereka dalam melaut. Persoalan dari arti penting tingkat pendidikan ini biasanya baru mengedepankan jika seorang nelayan ingin berpindah ke pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan yang rendah jelas kondisi itu akan mempersulit nelayan tradisional memilih atau memperoleh pekerjaan lain selain mejadi nelayan.

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat nelayan berarti menciptakan peluang bagi masyarakat nelayan untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Memberdayakan masyarakat nelayan tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

- a) Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.
- b) Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
- c) Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
- d) Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat nelayan haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat nelayan haruslah bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran.

Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

- (a) Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.

- (b) Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.
- (c) Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.

2.2. Penelitian Terdahulu

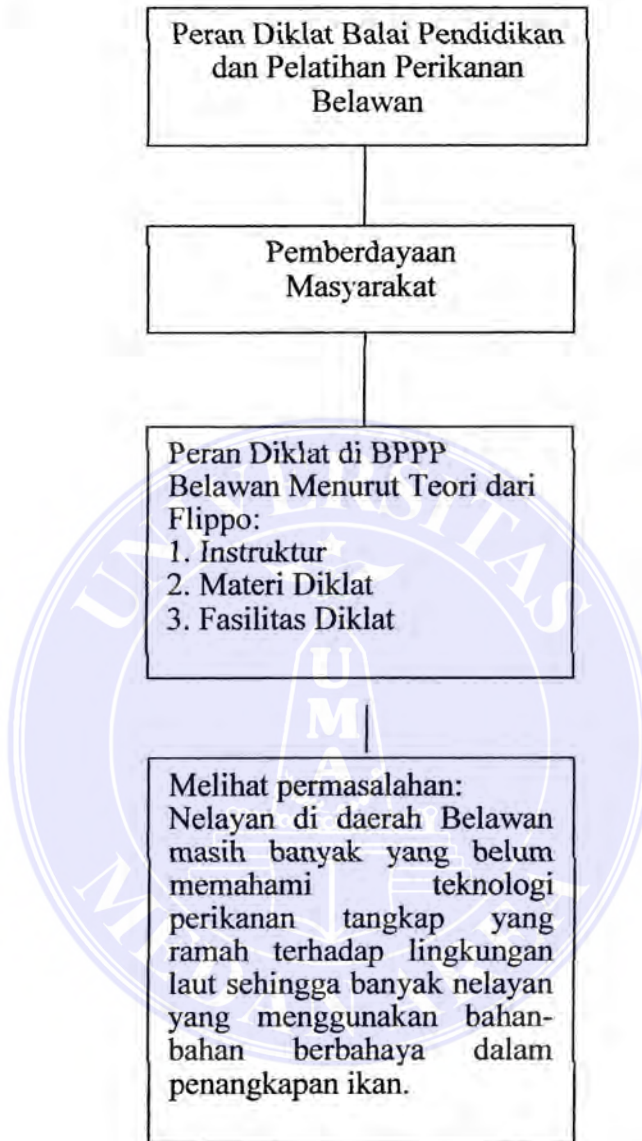
Hasil penelitian Nurul Jannah (2015) dengan judul "Peran Pemerintah

Kebudayaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program

Community Development Mengentaskan Kemiskinan Pada Kelompok Ternak Kambing di Kampung Bumen Wetan, Dusun Gilang, Bantul, Yogyakarta, diperoleh hasil peran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pendamping dalam peningkatan ekonomi anggota kelompok Ternak Kambing Gilang Mulyo adalah terdapat tiga peran dalam peningkatan ekonomi pertama, peran pendamping sebagai motivator yang memberikan semangat kepada anggota kelompok Ternak Kambing Gilang Mulyo agar terus bersemangat. Kedua, peran pendamping sebagai komunikator yang memberikan arahan yang jelas, pengantar inspirasi dari dinas terkait. Ketiga, peran pendamping sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas untuk kebutuhan yang dibutuhkan kelompok Ternak Kambing Gilang Mulyo. Sedangkan dampak dari peningkatan perekonomian adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas kambing yang lebih produktif, partisipasi anggota kelompok, dan peningkatan ekonomi yang dimiliki anggota kelompok Ternak Kambing Gilang Mulyo.

Hasil penelitian Rahmi (2016) dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Sektor Kuliner di Kabupaten Bantaeng, menunjukkan bahwa Pemerintah sangat mendukung usaha-usaha kreatif masyarakat. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan usaha kreatif masyarakat.

2.3. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Penulis (2020)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2015:3) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat

yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Peran Diklat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Perikanan Belawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2015:3).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan di Jalan Chaidir, Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2019 s/d Maret 2020.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi dan yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci yaitu Mathius Tiku, S.Pi, M.Si selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan
2. Informan utama yaitu Banjar Lumban Gaol, S.Pi selaku Instruktur Budidaya Perikanan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan, John Hotma Parlindungan Simamora selaku Widyaiswara di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan dan Agung Yunanto, A.Md selaku Kepala Seksi Penyuluh Perikanan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan
3. Informan tambahan yaitu Maringan Sianturi selaku peserta yang pernah mengikuti Diklat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi Accepted 25/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Diklat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Peran Diklat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Setiap variabel yang digunakan perlu dijabarkan suatu definisi konsep variabel yang jelas dan spesifik yang menggambarkan karakteristik masing-masing agar dapat mempermudah penelitian. Variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.
2. Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.
3. Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai sesuai kebutuhan pekerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering and sustainable.”*

Sedangkan definisi operasional penelitian ini didasarkan pada teori Flippo, yaitu:

1. Materi diklat

Materi pelatihan merupakan bahan ajaran yang menjadi pokok pelatihan, dan bahan ajaran tersebut telah disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami.

2. Instruktur atau pelatih

Instruktur atau pelatih merupakan orang yang sudah cukup menguasai materi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pelatihan yang akan dibahas dalam pelatihan. Instruktur tersebut dapat berasal

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

dari pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan cukup baik dan dapat pula berasal dari lembaga pelatihan atau orang yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan pelatihan.

3. Fasilitas diklat

Fasilitas yang digunakan dalam pelatihan mencakup semua alat peraga atau peralatan lain yang dapat digunakan untuk membantu memudahkan pelaksanaan pelatihan.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Diklat pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan telah memberikan pelatihan kepada peserta dengan berbagai materi yang dibutuhkan oleh nelayan, yang meliputi: materi tentang menjaga kelestarian sumber daya alam dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, materi tentang teknologi perikanan agar peserta lebih mahir menggunakan alat tangkap ikan, materi sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan teoritis khususnya teori perencanaan dan penangkapan ikan, serta materi keselamatan berlayar khususnya antisipasi ancaman berlayar. Instruktur sudah profesional dan memiliki sertitikat dibidang instruktur pelatihan nelayan, memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan nelayan, memiliki pengalaman di bidang pelatihan nelayan, mempunyai pengetahuan yang luas tentang kelautan, memahami setiap materi yang disampaikan, serta mampu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta diklat. Fasilitas diklat telah disediakan oleh balai diklat walaupun kondisinya kurang memadai, tidak membebankan peserta untuk menyediakan fasilitas atau alat-alat pelatihan, sedangkan biaya diklat yang dibebankan kepada peserta sudah tergolong murah sehingga

UNIVERSITAS MEDAN AREA bagi peserta pelatihan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

2. Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan program diklat pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Belawan adalah materi diklat masih kurang memuat semua hal-hal penting yang dibutuhkan nelayan, yaitu tidak memuat materi ancaman pidana perusakan lingkungan laut sehingga peserta kurang menyadari pentingnya memelihara kelestarian ekosistem laut, tidak memuat materi teknologi pengawetan ikan, serta tidak memuat materi kewirausahaan. Disamping itu instruktur diklat kurang bersedia meluangkan waktu bersama peserta diklat karena kesibukannya di tempat lain. Fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan diklat juga masih kurang memadai.

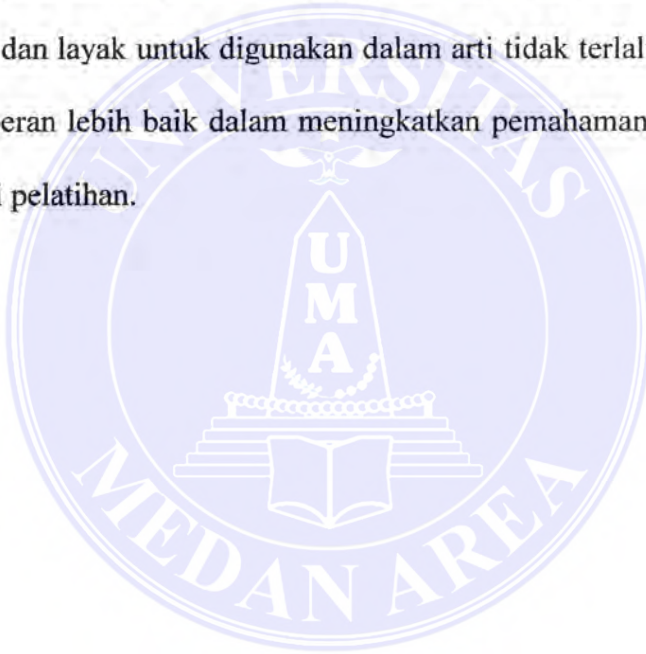
5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaran diklat perlu membuat materi yang berkaitan dengan ancaman hukum perusakan lingkungan laut oleh alat-alat tangkap yang tidak ramah terhadap lingkungan.
2. Penyelenggara diklat perlu memberikan materi teknologi pengawetan ikan sehingga nelayan dapat secara langsung melakukan pengawetan hasil tangkapannya dan tidak harus buru-buru menjualnya kepada pedagang pengumpul dengan harga murah karena takut busuk.
3. Penyelenggara diklat sebaiknya memberikan materi kewirausahaan agar nelayan menyadari bahwa perhitungan biaya dalam usaha perlu dilakukan

sehingga hasil perhitungan benar-benar menunjukkan kondisi usaha yang sebenarnya.

4. Instruktur sebaiknya berupaya membagi waktu dengan lebih baik agar terdapat waktu lebih yang dapat digunakan untuk bersama peserta diklat di luar jam diklat sehingga peserta mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk meningkatkan pemahamannya mengenai materi diklat.
5. Penyelenggara diklat perlu mengupayakan agar tersedia fasilitas yang lebih baik dan layak untuk digunakan dalam arti tidak terlalu tua sehingga dapat berperan lebih baik dalam meningkatkan pemahaman peserta diklat atas materi pelatihan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2016. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu. 2015. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwas, Oos. 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Depdikbud. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dessler, Gary. 2014. *Manajemen Personalia*, Jakarta: Indeks.
- Hanafiah, A.M. dan A.M. Sacfuddin. 2017. *Tataniaga Hasil Perikanan*. Jakarta: UI Press.
- Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2014. *Pemberdayaan masyarakat : konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*, Jakarta: Bappenas.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Mubyarto. 2014. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Mulyasa. 2015. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nadler, David A. dan Lawler, Edward E. 2016. *Motivasi: Suatu Pendekatan Diagnostik, Dalam Hand Book Of Organizations, Kajian dan Teori Organisasi*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Amara Books.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23

- Notoadmodjo, Soekidjo. 2014. *Manajemen Personalia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Salemba Empat.
- Salman. 2015. *Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarwono, Sarlito. 2016. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sastrawidjaya. 2014. *Nelayan Nusantara, Pusat Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastrohadiwiryo. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Djambatan.
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: Refika Aditama.
- Simamora, Henry. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2014. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Vindyandika. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wangladi. 2015. *Petunjuk Teknis Penangkapan Ikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Widjaja, HAW. 2015. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Jannah, Nurul. 2015. *Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Community Development Mengentaskan Kemiskinan Pada Kelompok Ternak Kambing di Kampung Bumen Wetan, Dusun Gilang, Bantul, Yogyakarta*. Jurnal Administrasi Vol 2. No.5.
- Rahmi. 2016. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Sektor Kuliner di Kabupaten Bantaeng*. Jurnal Administrasi Vol. 1 No. 3.
- Zubair, Sofyan dan M. Yasin. 2011. *Analisis Pendapatan Nelayan Pada Unit Alat Tangkap Payang Di Desa Pabbaressang Kec. Bua Kab. Luwu*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Skripsi. Universitas Hasanudin. Makassar.

Peraturan:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/Permen-KP/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Website/Internet:

- <https://katadata.co.id/berita/2016/06/16/jokowi-masa-depan-indonesia-ada-di-laut>, diakses pada tanggal 20 November 2019